

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdul Latif, Maftuh Effendi, Muhammad Dzul Ikram, 2021, *Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*, Kencana Jakarta.
- Adami Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing: Malang.
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Andi Hamzah.2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses,:Jakarta.
- Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni: Bandung.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni: Bandung.
- Darwan Prinst, 1992, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan: Jakarta.
- David Chaikin and J.C Sharman, 2009, *Corruption And Monay Laundering*, Limited: Inggris.
- Erdianto Effendi, 2022, *Problematika Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri dan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama : Bandung.
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- 2001, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi; Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Eddy O.S. Hiarej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum*, Erlangga : Jakarta.

- Eggi Sujana, 2008. *Republik Tanpa KPK, Koruptor Harus Mati (Kata Pengantar)*. JP.Books: Surabaya.
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Kajian Yuridis Normatif*, Sinar Grafika: Jakarta.
- E. Sumaryono, 2000. *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius: Yogyakarta.
- E. Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. FHPM Univ. Negeri Padjadjaran, Cet. ke-4, Bandung.
- Evi Hartanti, 2006. *Tindakan Pidana Korupsi*, cet ke-2, Sinar Grafika: Jakarta.
- Febby Mutiara Nelson, 2020, *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Ferry Aries Suranta, 2010. *Peranaan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramedia Publishing : Depok.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju: Bandung.
- Hariman Satria, 2020, *Hukum Pidana Korporasi*, Kencana: Jakarta.
- Hendardi, 2020, *Membela Hak Ekosob dan Melawan Korupsi*, PT. Gramedia: Jakarta.
- Herman Mostar, 1983, *Peradilan Yang Sesat*, Grafiti Pers: Jakarta.
- Henry Indraguna, Kayaruddin Hasibuan, 2020, *Memahami Tafsir Pasal Tindak Pidana Korupsi*, Tras Mediacom: Jakarta Timur.
- Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan: Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Penerbit Prof. Oemar Seno Adji, SH. & Rekan: Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Irsan Arief, 2022, *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan dan Diskresi Antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana / Korupsi*, Mekar Cipta Lestari : Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers: Jakarta.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, 2004, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.

- Lilik Mulyadi, 2007, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Penerbit Alumni : Bandung.
- , 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Penerbit Alumni : Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2022, *Kembang Setaman Tindak Pidana Korupsi Indonesia dalam Teori, Norma dan Parktik*, Kencana: Jakarta.
- Luhut M.P Pangaribuan, 2009, *Lay Judges dan Hakim Adhoc; Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.
- Lexy J.Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Komariah, 2005, ***Hukum Perdata***, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Press: Malang.
- Leden Marpaung, 1992. *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Lili Rasjidi, 1982. *Dasar-Dasar Filsafatukum*. Alumni : Bandung.
- Lili Rasjidi & IB Wiyasa, 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya : Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Masruchin Ruba'i, 1997, *Mengenal Pidana dan Pidana Di Indonesia*. IKIP, Malang.
- Matthew H. Fleming, 2005. *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic Taxonomy: Draft for Comments*, Version Date, University College : London.
- Michael Levi, 2004. *Tracing and Recovering the Proceeds of Crime*. Cardiff University, Wales, UK, Tbilisi, Georgia.
- Mahrus Ali, Deni Setya Bagus Yuherawan, 2021, *Delik-Delik Korupsi*, Sinar Grafika: Jakarta Timur.

- Maidin Gultom, 2018, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Refika Aditama: Bandung.
- Mohammad Yamin, 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- M. Irsan Arief, 2022, *Pertanggungjawaban Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis dan Pidana/Korupsi*, Mekar Cipta Lestari : Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet. ke-9, Sinar Grafika: Jakarta.
- , 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua Sinar Grafika : Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha: Jakarta.
- Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Korupsi; Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Penerbit Kompas: Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP: Semarang.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- O.C Kaligis & Association, 2008, *Corruption As A Toc*, Yarsif Watampone: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta.
- Pitani Deslani, 2021, *Restorasi Keadilan Tinjauan Perkara SNI Suap dan Gratifikasi*, Uwais Inspirasi Indonesia : Padang.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1998, *Penataan Hukum Administrasi*; Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru

Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita: Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2021, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, CV. Mandar Maju : Bandung.

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta: Jakarta.

-----, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup : Jakarta.

-----, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju : Bandung.

Ridwan, HR., 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta.

Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dilengkapi Dengan 4 Undang- Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta.

SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty: Yogyakarta.

Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha: Jakarta.

Surachman, Suhandi, 2015, *Cahaya, Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supardi, 2020, *Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan*, Kencana : Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers : Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers : Jakarta.

Soerjono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta : Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara : Jakarta.

**Satjipto Rahardjo, 1977. Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Studi Hukum. Cet. I, Alumni: Bandung.**

- Setiawan, 1991. *Empat Kriteria Perbuatan Melawa Hukum dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi, dalam Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum*. Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI.
- Selo Soemardjan dalam Evi Hartati, 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Semarang.
- Sjachran Basah, 1985. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Penerbit Alumni, Cet. ke-1, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Fungsi Perundangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, CV Sinar: Bandung.
- Sri Sumantri M, 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*. Alumni: Bandung.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2002, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, cetakan Kelima : Yogyakarta.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suradji, Buguati, Sutriya, ed., 2008. *Pengkajian tentang Kriminalisasi, pengembalian aset, kerjasama internasional dalam konvensi PBB*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM : Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1983. *Pengertian Negara Hukum*, Alumni : Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1992. *Putusan Banding Dalam Perkara Pertamina Lawan Kartika Tahir*. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Subekti, 1992. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa : Jakarta.
- Suradi, 2006. *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*. Gava Media, Yogyakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007. *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafiti : Jakarta.
- Theodorus M. Tuanakotta, 2008, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Selemba Empat : Jakarta.
- Wahyudi Kumorotomo, 1992. *Etika Administrasi Negara*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1969. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.

Wofgang Friedman, 1971. *The State and The Rule of Law ini a Mixed Economy*. Stevens and Sons, London.

Yara Esquitel, 2009. "The United Nations Convention against Corruption and Asset Recovery: the Trail to Repatriation", *Basel Institute on Governance*, Steinenring 60, 4051 Basel, Switzerland.

Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media : Yogyakarta.

Yenti Ganarsih, 2003. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*. cet. 1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesi : Jakarta.

Waluyadi, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju : Bandung.

#### **Jurnal dan Sumber lainnya**

Adnan Topan Husodo, "Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi". dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana, Jurnal Legislasi Indonesia, 2010.

Agung Tri Wahyudianto, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penetapan Kerugian dan Perhitungan Kerugian Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi*,. Badamai Law Journal, Vol 3, Issues 2 September 2018.

Adi, Ashari, "Peran Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi", Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4 No. 1 (Maret 2007).

Amir Syamsudin, *Putusan MK dalam Penegakan Hukum Korupsi*, Harian Kompas 02 Februari 2017.

Bismar Nasution,"Stolen Asset Recavery Initiative dari Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia" *Makalah Narasumber* dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN 2007), Jakarta 28 Nopember 2007

Catham House, *The UN Convention Against Corruption*, A summary of discussion at the International Law Programme Discussion Group at Chatham House on 27<sup>th</sup> September 2005.

Chairul Huda, *Dualisme Pemberantasan Korupsi Di Indonesia (Antara Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Umum)* Makalah dalam

Seminar Nasional Pemberantasan Korupsi, Universitas Jember 28 April 2007.

- Dadin E. Saputra, Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum dan Pemikiran SYARIAH*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2018
- Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Dimitri Vlassis, *The United Nations Convention Against Corruption, Overview of Its Contents and Future Action*, Resource Material Series No. 66.
- Eddy O.S Hiariej, *Pengembalian Aset Kejahatan*. *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 13, Mei-Agustus, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 30 Januari 2012 di Yogyakarta.
- Hans Klecatsky, “*Reflection on The Rule of Law and in Particular on The Principle of Asministrative Action*” dalam jurnal of The International Commition of Jurist, Vol IV, Nomor 2, 1963.
- Harkristuti Harkrisnowo, “Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan”, Artikel pada *Jurnal Keadilan* Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004.
- I Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996
- I Gutti Ketut Ariawan, *Stolen Aset Recovery, Suatu Harapan dalm Pengembalian Aset negara*, *Kerthapatrika*, Vol. 33 No. 1, Januari 2008
- Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi”, Makalah dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Indonesia, FHUI, Jakarta, 1993



- Nasution, Bismar 2007. "Stolen Asset Recovery Initiative dari Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia" *Makalah Narasumber* dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN 2007), Jakarta 28 Nopember 2007.
- Omar Swartz, *On Social Justice and Political Struggle*, esay, Human Nature Review, Volume 4, 15 Agustus 2004.
- Paton dalam Eddy Mulyadi Supardi, Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi, Ceramah Ilmiah. Bogor: FH Pakuan, 24 Januari 2009
- Penelitian KHN, Stolen Aset Recovery (STAR) iniatif, Tahun 2009. Basrief Arief, disampaikan dalam diskusi ahli tentang Implementasi Stolen Asset Recovery (StAR) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diadakan oleh Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 28 Januari 2008
- Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2012, Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang *Pengembalian Aset Tindak Pidana*, Jakarta, 2012.
- Romli Atmasasmita. *Kebijakan Pengembalian Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi-2003 Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Makalah pada workshop pemulihan aset tindak pidana, diselenggarakan oleh Mahupiki di Jakarta, 25-29 Agustus 2014.
- \_\_\_\_\_, *Urgensi RUU Pengembalian Aset*, dimuat di <https://korup5170.wordpress.com/opiniartikel-pakar-hukum/urgensi-ruu-pengembalian-aset/>. Diakses tanggal 30 Nopember 2014.
- \_\_\_\_\_, *Asset Recovery Dan Mutual Assistance In Criminal Matters*, Makalah Untuk Pelatihan Hukum Pidana, Kerjasama MAHUPIKI Dan Fakultas Hukum UGM, Tanggal 23-27 Februari 2014
- Saldi Isra, *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kanwil Depkumham Prov. Jawa Tengah, tanggal 22 Mei 2008, di Semarang.

Scher Daniel, *Asset Recovery, Repatriating Africa's Looted Billions*, African Security Review, Vol. 14, No. 4, 2005.

Swartz, Bruce, C., *Statement before the United States Senate Committee on Foreign Relations In Re The United Nations Convention Against Corruption*, June 21, 2006.

**Thoga H. Hutagalung, *Hukum dan Keadilan Dalam Pemahaman Filsafat Pancasila dan UUD 1945*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996.**

Todung Mulya Lubis, makalah “*Memerangi Korupsi di Peradilan Dari Sisi Advokat*”, Makalah pada Seminar Anti Corruption Summit diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta 11-12 Agustus 2005

Vito Tanzi, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, Agustus 1994.

Yunus Husein, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 7 No. 4, Desember 2010.

\_\_\_\_\_, *Kerjasama Internasional Dalam Pembekuan, Penyitaan dan Pengembalian serta Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Lokakarya Tentang Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi, Semarang, 21-22 Mei 2008

\_\_\_\_\_, “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 Nomor 3, 2003).

Yennti Garasih, “Asset Recovery Act sebagai strategi dalam pengembalian aset hasil tinadk pidana korupsi” , *Jurnal Legislasi Indonesi*, Vol. 7.0.4 (Desember 2004).

#### **Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern  
Pemerintah  
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan  
dan Pembangunan  
Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian  
Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam  
Rangka Mewujudkan Kesejahteraan rakyat  
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas  
Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

#### **A. Laporan**

Kejaksaan Negeri Padang, *Laporan Hasil Audit Dari Auditor Internal Kejaksaan  
Tinggi Sumatera Barat No: R-478/L.3/Hs/08/2021 10 Agustus 2021  
Dugaan Tindak pidana korupsi Pada Koperasi Simpan Pinjam  
Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Koto Lua Kecamatan Pauh Kota  
Padang Tahun 2019 s.d 2020. Kejaksaan Tinggi Sumbar Kejati Sumbar.*

Kejari Pasaman Barat, *Laporan Hasil Audit Dari Auditor Internal Kejaksaan  
Tinggi Sumatera Barat No: R-362/L.3/Hs/04/2022 tanggal 25 April 2022  
Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Pembangunan  
lapangan Tennis Indoor Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang  
Kabupaten pasaman barat Tahun Anggaran 2018.*